

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Juli 2025, Banyuwangi mengalami inflasi month to month (m-to m) sebesar 0,29 persen. Inflasi ini terutama didorong oleh meningkatnya harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai rawit, beras, tomat, ikan lamuru, ikan tongkol, udang basah, telur ayam ras, jeruk, cabai merah, dan bensin yang memberikan andil signifikan terhadap inflasi. Sementara itu, beberapa komoditas dominan seperti emas perhiasan, daging ayam ras, terong, labu siam/ jipang, cumi-cumi, ketimun, bawang putih, gula pasir, sawi hijau, dan angkutan udara mengalami penurunan harga sehingga menyumbang deflasi meskipun tidak cukup besar untuk menahan tekanan inflasi. Secara year to date (y-to-d), inflasi Banyuwangi pada bulan ini mencapai 2,25 persen. Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) tercatat 2,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,74. Tekanan inflasi y-on-y terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas pada emas perhiasan, tomat, bawang merah, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan tongkol/ikan ambu-ambu, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, sepeda motor, udang basah, akademi/ perguruan tinggi.
- b. Memasuki Agustus 2025, Banyuwangi mengalami deflasi month to month (m-to-m) sebesar -0,08 persen, yang terjadi seiring koreksi harga pada sejumlah komoditas seperti penurunan harga cabai rawit, tomat, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, kacang panjang, telur ayam ras, bayam, sawi hijau, cumi-cumi, labu siam/jipang, dan bensin. Meski inflasi terjadi secara m-to-m pada sejumlah komoditas seperti beras, bawang merah, mobil, daging ayam ras, emas perhiasan, anggur, cabai merah, ketimun, tarif kendaraan roda 4 online, dan susu bubuk, sebagian besar kelompok pengeluaran lain masih mencatat kenaikan indeks harga meskipun tipis. Secara year to date (y-to-d), inflasi hingga Agustus tercatat 2,17 persen. Sementara itu, inflasi year on year (y-on-y) pada bulan ini naik menjadi 2,87 persen, sama dengan bulan sebelumnya, dengan IHK mencapai 109,65. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year (y on y) bulan Agustus 2025 masih dipimpin oleh komoditas emas perhiasan, beras bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sepeda motor, kelapa, udang basah, dan tomat.
- c. Pada September 2025, Banyuwangi kembali mencatat deflasi month to month (m-to-m) sebesar -0,22 persen, lebih dalam dibanding deflasi pada bulan Agustus. Deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga khususnya komoditas seperti bawang merah, beras, tomat, labu siam/jipang, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan lamuru, tongkol di awetkan, terong, bayam, dan daun paku/pakis. Secara year to date (y-to-d), inflasi Banyuwangi mencapai 2,39 persen. Inflasi year on year (y-on-y) pada September naik menjadi 3,22 persen dengan IHK sebesar 109,89, menunjukkan tekanan inflasi yang semakin meningkat dibandingkan dua bulan sebelumnya. Kenaikan harga terutama berasal dari komoditas emas perhiasan, beras, daging ayam ras, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, jeruk, cabai merah, kelapa, Sigaret Kretek Mesin (SKM), udang basah. Meski demikian, kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan menjadi penahan inflasi dengan mencatat deflasi secara y-on-y.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pergerakan inflasi pada Triwulan III menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi, dimulai dari inflasi m-to-m positif pada Juli (0,29%), kemudian kembali mengalami deflasi pada Agustus (-0,08%), dan ditutup dengan inflasi lagi pada September (0,22%). Pola ini mengindikasikan bahwa tekanan harga selama triwulan ketiga masih dipengaruhi oleh variasi musiman, terutama panen hortikultura, pergerakan harga pangan strategis, serta perubahan pola konsumsi masyarakat setelah libur panjang sekolah dan menjelang kuartal akhir.
- b. Tekanan deflasi Agustus terutama didorong oleh melimpahnya pasokan hortikultura, seperti cabai rawit (-0,22%), tomat (-0,21%), dan ikan tongkol (-0,04%) yang tercatat memberikan andil deflasi signifikan secara m-to-m. Hal ini konsisten dengan peningkatan panen pertanian dan hasil tangkapan laut yang cukup tinggi pada periode tersebut. Kondisi ini melanjutkan pola penurunan harga pangan segar yang juga sempat muncul di beberapa bulan sebelumnya pada komoditas serupa, menunjukkan bahwa stabilitas pasokan lokal Banyuwangi masih menjadi faktor penyeimbang harga yang kuat.
- c. Pada September, inflasi tahunan (y-on-y) Banyuwangi mencapai 3,22 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian bulan sebelumnya (Juli dan Agustus). Angka ini merupakan inflasi y-on-y tertinggi sepanjang tahun berjalan dan menandakan meningkatnya tekanan konsumsi rumah tangga. Dengan tingkat inflasi y-on-y Jatim sebesar 2,03 persen dan Nasional berkisar 2,2-2,5 persen, catatan Banyuwangi menunjukkan adanya tekanan harga yang relatif lebih kuat, namun masih berada dalam rentang aman target nasional 1,5-3,5 persen.
- d. Kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan pada periode Juli-Agustus, terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil sangat signifikan. Lonjakan harga emas yang meningkat hingga puluhan persen secara tahunan menjadi faktor utama yang mendorong tekanan pada inflasi inti. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan harga emas global, tetapi juga berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat Banyuwangi yang memiliki tingkat konsumsi emas perhiasan cukup tinggi. Dengan demikian, pergerakan harga emas memiliki dampak yang lebih kuat terhadap struktur inflasi daerah dibandingkan komoditas lain dalam kelompok ini.
- e. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap memberikan peran besar sebagai pendorong inflasi sepanjang triwulan, terutama karena kenaikan harga beras, bawang merah, SKM, minyak goreng, ikan tongkol, dan tomat. Pada Agustus saja, komoditas beras dan bawang merah masing-masing menyumbang 0,40 persen terhadap inflasi tahunan, menunjukkan bahwa komoditas pangan utama masih menjadi faktor paling sensitif terhadap daya beli masyarakat. Walaupun beberapa komoditas mengalami deflasi musiman, tekanan pada pangan strategis tetap dominan dan perlu kewaspadaan.
- f. Dari sisi konsumsi masyarakat, masuknya sepeda motor sebagai komoditas dominan penyumbang inflasi y-on-y pada September (andil 0,05 persen) menandakan daya beli untuk barang tahan lama (*durable goods*) masih terjaga. Sementara itu, komoditas elektronik seperti telepon seluler justru memberikan andil deflasi di September, menunjukkan perubahan preferensi dan penyesuaian harga barang teknologi. Pada kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang termasuk dalam 10 komoditas dominan, terlihat bahwa beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan harga. Kenaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut

berkaitan erat dengan penyelenggaraan Maulid Nabi dengan Upacara Endog-Endogan yang menjadi tradisi masyarakat Banyuwangi. Meskipun ketersediaan lokal untuk komoditas ini cukup memadai sehingga fluktuasi harga relatif terkendali dan menguntungkan produsen lokal, perayaan tersebut tetap memicu tekanan inflasi pada bulan-bulan tertentu.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Dalam upaya menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok, sejumlah upaya dilakukan Pemkab Banyuwangi diantaranya dengan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah. Pemkab Banyuwangi melaksanakan operasi pasar bersama Perum Bulog, Bank Indonesia Jember, dan pelaku usaha lokal sebagai upaya langsung untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau. Operasi pasar dilaksanakan secara bergilir di berbagai kecamatan dan desa guna menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Banyuwangi. Diantaranya operasi pasar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, yang disambut antusias oleh masyarakat. Operasi pasar ini menyediakan berbagai bahan pokok penting dengan harga di bawah harga pasar, seperti telur dengan pasokan harian 450 kilogram, beras medium sebanyak tiga ton per hari, beras premium 500 kilogram selama tiga hari, serta beras SPHP hingga 990 kilogram. Selain itu, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung, gula pasir, mi instan, dan LPG 3 kg juga turut disediakan. Tersedianya komoditas vital dengan harga terjangkau ini memberikan ruang bagi rumah tangga untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar meskipun terjadi tekanan harga di pasar umum.
- b. Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi dengan berpartisipasi aktif dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional. Pada pelaksanaan GPM 30 Agustus 2025, Banyuwangi menyalurkan 49,05 ton beras, 2.115 liter minyak goreng, dan 1.440 kilogram gula pasir di 25 kecamatan. Melalui penyaluran komoditas dengan harga murah dan akses yang diperluas hingga tingkat kecamatan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk membeli kebutuhan mendasar dengan harga terjangkau, sehingga daya beli tetap terjaga di tengah potensi tekanan harga. Komitmen Pemkab Banyuwangi sejalan dengan arahan Menteri Pertanian dan Presiden terkait penguatan ketahanan pangan nasional, terlebih Banyuwangi sendiri merupakan daerah lumbung pangan dengan surplus beras yang signifikan—mencapai 214.039 ton pada Januari-Juli 2025. Selain mengikuti GPM, Pemkab Banyuwangi bersama Bulog dan TNI-Polri juga rutin menggelar operasi pasar sebagai langkah pengendalian harga yang berkelanjutan. Pada periode Juli-September 2025, target penyaluran beras SPHP ditetapkan sebesar 12.500 ton, dan hingga 29 Agustus telah terealisasi 538,58 ton. Operasi pasar ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, seperti beras SPHP seharga Rp57.500 per 5 kg, minyak goreng Rp15.500 per kg, dan gula pasir Rp17.500 per kg.
- c. Pemkab Banyuwangi terus mengoptimalkan peran Toko Pengendalian Inflasi Banyuwangi (TOP Si Wangi) dalam upaya menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok. Top Si Wangi berfungsi sebagai toko penyeimbang untuk mengantisipasi inflasi dan lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pemkab bermitra dengan Bulog dan sejumlah toko sebagai mitra untuk menjadikan toko tersebut memiliki fungsi sebagai

Top Si Wangi. Ini menjadi salah satu cara agar saat terjadi kenaikan harga toko-toko ini bisa menjual bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini akan melengkapi operasi pasar keliling. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki tugas melakukan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, untuk mencegah terjadinya inflasi daerah, salah satunya dengan melakukan langkah preventif yakni memastikan ketersediaan bahan pokok yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena itu, TPID menggandeng mitra toko-toko milik warga sebagai solusi untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Kami dorong di setiap pasar ada Top Si Wangi. Toko-toko tersebut setiap harinya menyediakan bahan pokok dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, sedangkan Bulog menjadi pihak penyuplai bahan-bahan pokok. Ketika ada harga kebutuhan pokok tertentu yang melesat cukup tinggi, maka Top Si Wangi akan menjual barang yang naik itu dengan harga yang sudah disubsidi. Harapannya agar harga bisa kembali stabil dan terkendali.

- d. Dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro, Pemkab Banyuwangi merancang berbagai program bantuan usaha mikro. Pemkab Banyuwangi menggulirkan berbagai program pemberdayaan dengan memperbanyak penerima bantuan penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM). Seperti program Kanggo Riko, yang merupakan pemberian bantuan alat usaha kepada pelaku usaha mikro. Ini satu dari berbagai program upaya pengentasan kemiskinan. Untuk program ini, prioritasnya diperuntukkan bagi ibu-ibu hebat yang menjadi tulang punggung keluarga. Para penerima mendapatkan Rp2,5 juta, disesuaikan dengan kebutuhan usahanya. Mereka didorong untuk mengembangkan usaha rumahan yang bisa meningkatkan pendapatan hariannya. Mulai tahun ini para penerima program Kanggo Riko juga mendapatkan bantuan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Mereka didaftarkan untuk program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Selain Kanggo Riko, sejak 2021 juga dimulainya program Warung Naik Kelas (Wenak). Program pemberian bantuan alat usaha tersebut telah disalurkan pada 1.364 pelaku usaha mikro. Program Wenak menyasar para pelaku usaha skala mikro yang masuk dalam data keluarga kurang mampu. Penerima program berasal dari usulan desa/kelurahan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan setempat. Para penerima manfaat program wenak mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp 1 juta per orang. Bantuan bisa dimanfaatkan untuk meng-upgrade peralatan usaha ataupun menambah modal untuk meningkatkan usahanya.
- e. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan menginisiasi program bantuan tanaman sayuran dalam bentuk polybag untuk keluarga yang terdaftar di Program Pemberdayaan Pangan, Pertanian, dan Keluarga Berencana (P3KB). Secara simbolis bantuan tersebut diberikan sebanyak ratusan polybag berisi tanaman sayuran seperti cabe, tomat, dan terong disiapkan untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, sekaligus memperkenalkan konsep pertanian urban, dan memberikan alternatif pangan yang sehat dan bergizi. Para penerima juga mendapatkan pengarahan sekaligus petunjuk pemeliharaan, dan informasi terkait cara memaksimalkan hasil panen. Penerima manfaat yang hadir menyambut baik program ini. Mereka berharap bahwa tanaman sayuran ini tidak hanya memberikan manfaat sekarang, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan ketahanan pangan keluarga. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat dalam aspek ekonomi, gizi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program ini dapat diperluas ke wilayah lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga juga dilakukan melalui perluasan

f.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai kecamatan. Penambahan SPPG baru di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari menjadikan total enam dapur umum yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi pelajar setiap hari. Perluasan ini tidak hanya membantu meringankan beban pengeluaran pangan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi menekan tekanan harga di tingkat konsumen. Salah satu faktor kunci dalam menjaga keterjangkauan harga adalah penggunaan bahan baku yang seluruhnya diperoleh dari petani dan pasar lokal, sehingga menciptakan permintaan yang stabil bagi produsen lokal. Pola pembelian langsung ini menjaga harga komoditas tetap wajar, menghindari gejolak akibat rantai distribusi panjang, dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia dengan harga yang stabil. Keberadaan dapur komunitas seperti SPPG Blimbingsari, yang melayani 3.481 siswa dari 26 sekolah, juga memperluas akses pangan terjangkau bagi masyarakat. Dengan menyediakan makanan siap konsumsi setiap hari, dapur umum ini mengurangi ketergantungan rumah tangga pada pembelian pangan di pasar, sehingga membantu menjaga daya beli keluarga. Selain itu, dapur komunitas ini digerakkan oleh 47 tenaga kerja lokal dan memanfaatkan suplai bahan baku dari daerah sekitar, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang saling mendukung antara produsen dan konsumen. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat rantai pasok lokal tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa ketersediaan pangan bergizi dengan biaya minimal. Kombinasi antara pemanfaatan bahan baku lokal dan keberadaan dapur komunitas inilah yang menjadikan Program MBG berperan strategis dalam menjaga keterjangkauan harga.

g. Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga melalui penunjukan sebagai daerah piloting nasional program Bantuan Sosial (Bansos) digital berbasis portal Parlinsos. Program ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami tekanan. Dengan sistem digital yang memadukan identitas penduduk, data biometrik, dan pertukaran data lintas kementerian, proses verifikasi PKH dan BPNT menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Ketepatan sasaran ini memastikan bahwa bantuan diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, sehingga membantu menjaga kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa terkena dampak penuh dari kenaikan harga komoditas pangan strategis. Digitalisasi bansos juga menciptakan mekanisme perlindungan sosial yang lebih responsif dan adaptif terhadap gejolak harga. Ketika harga kebutuhan pokok naik, keluarga penerima PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai memperoleh dukungan tambahan untuk menjaga daya beli mereka, sehingga tidak perlu mengurangi konsumsi pangan dasar. Dengan demikian, keberadaan sistem bansos digital tidak hanya meningkatkan efisiensi tata kelola, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keterjangkauan harga di tingkat rumah tangga.

h. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Bank Indonesia Jember terus memperkuat pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga melalui upaya peningkatan daya saing UMKM lokal agar mampu menembus pasar global. Melalui Seminar Nasional "UMKM Go Export: Digital Drive, Global Thrive", ratusan pelaku UMKM Banyuwangi memperoleh penguatan kapasitas mengenai aturan ekspor, tren permintaan internasional, hingga strategi pemasaran global. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk mendorong UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Ketika UMKM mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar ekspor, maka kualitas, produktivitas, dan daya saing mereka meningkat, yang berdampak langsung pada terciptanya harga yang kompetitif di pasar domestik. Peningkatan daya saing

produk lokal ini berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Produk yang semakin berkualitas dan mampu bersaing di pasar global menciptakan kondisi pasar lokal yang lebih sehat—di mana pelaku UMKM termotivasi untuk menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan mutu. Selain itu, ekspansi pasar luar negeri membantu memperkuat skala produksi UMKM, sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan dan harga produk dapat tetap stabil di tingkat konsumen. Melalui kolaborasi antara BI Jember dan Pemkab Banyuwangi, upaya penguatan kapasitas ekspor UMKM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keterjangkauan harga dengan memastikan produk-produk lokal tetap kompetitif dan stabil dalam rantai pasar domestik.

- i. Pengendalian inflasi dari sisi keterjangkauan harga juga diupayakan melalui strategi *City Branding* yang bukan hanya meningkatkan daya tarik daerah, tetapi juga memperluas pasar bagi produk-produk UMKM lokal. Keberhasilan city branding Banyuwangi yang dipelajari oleh banyak daerah melalui *Executive Education Program* (EEP) telah membawa dampak ekonomi nyata, terutama bagi pelaku UMKM yang kini mendapatkan eksposur dan peluang pemasaran yang jauh lebih luas. Promosi daerah yang efektif mulai dari atraksi wisata, festival seni, hingga pameran produk unggulan secara langsung meningkatkan permintaan terhadap produk lokal, sehingga pasar UMKM tidak hanya bergantung pada konsumen setempat tetapi juga wisatawan dan pembeli dari luar daerah. Peningkatan permintaan ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan volume produksi, yang pada akhirnya memperkuat rantai pasok lokal dan menciptakan efisiensi biaya produksi. Seiring dengan meningkatnya volume produksi dan terbukanya akses pasar, produk-produk UMKM Banyuwangi menjadi semakin kompetitif, baik dari sisi kualitas maupun harga. Ketika UMKM mampu memproduksi dalam skala lebih besar dengan efisiensi yang lebih baik, biaya produksi per unit dapat ditekan, sehingga harga produk lokal dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. *City Branding* juga menciptakan iklim investasi dan kunjungan wisata yang kondusif, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem UMKM dan mendorong inovasi produk. Kombinasi antara meningkatnya permintaan, perluasan pasar, dan efisiensi produksi inilah yang menjadikan *City Branding* berperan sebagai instrumen tidak langsung namun strategis dalam menjaga keterjangkauan harga (K2). Dengan demikian, promosi UMKM lokal melalui City Branding membantu stabilisasi harga barang lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
- j. Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah dari sisi keterjangkauan harga (K2) melalui pelaksanaan Gerakan Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM, dan Warung Rakyat yang digelar setiap “tanggal cantik” setiap bulan. Pada momentum 9/9, Bupati Ipuk Fiestiandani menginstruksikan seluruh ASN, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha untuk melakukan pembelian kebutuhan harian melalui layanan ojek online (ojol). Langkah ini bukan sekadar menggeliatkan ekonomi rakyat kecil, tetapi juga memastikan bahwa transaksi di sektor UMKM dan pasar tradisional tetap bergerak dinamis. Perputaran uang dan barang yang stabil membantu mencegah stok menumpuk atau stagnan, yang pada akhirnya menjaga kelancaran arus distribusi barang dan mengurangi risiko kenaikan harga di tingkat konsumen. Gerakan belanja ini terbukti efektif menopang aktivitas ekonomi pelaku UMKM, warung rakyat, hingga driver ojol, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketika transaksi pada sektor UMKM meningkat, suplai barang terus bergerak dan pasar tetap hidup, sehingga harga kebutuhan pokok lebih mudah dikendalikan. Pergerakan barang yang lancar membuat pedagang mampu mempertahankan stok dalam jumlah wajar, tanpa tekanan yang menyebabkan kenaikan harga. Dengan demikian, gerakan belanja tanggal cantik menjadi bagian penting strategi daerah untuk menjaga keterjangkauan harga (K2)

melalui stimulasi permintaan, perputaran stok yang sehat, dan stabilitas pasar. Program ini melengkapi berbagai intervensi pro rakyat lainnya, seperti Banyuwangi Berbagi, yang bersama-sama membentuk bantalan sosial dan mendukung stabilitas inflasi daerah secara berkelanjutan.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemkab Banyuwangi melibatkan dinas-dinas teknis yang bergerak di sektor hulu, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan yang berperan menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu inflasi.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui penjaminan ketersediaan dan kelancaran pasokan pangan, salah satunya dengan memastikan kesiapan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dalam rangka persiapan Panen Raya dan percepatan tanam Musim Tanam (MT) III. Peninjauan langsung terhadap kesiapan UPJA dilakukan untuk memastikan dukungan mekanisasi pertanian berjalan optimal, mulai dari pembibitan padi menggunakan grain seeder, praktik tanam dengan rice transplanter, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Mekanisasi ini berperan penting dalam mempercepat proses tanam dan panen, sehingga siklus produksi pangan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Percepatan tanam MT III yang didukung oleh UPJA Alsintan mendorong peningkatan luas tanam dan produktivitas pertanian. Dengan bertambahnya volume produksi dan terjaganya kontinuitas panen, ketersediaan pasokan beras dan komoditas pangan strategis di Banyuwangi dapat dipertahankan, sehingga potensi tekanan harga akibat keterbatasan pasokan dapat diminimalkan. Selain aspek teknis, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengedepankan dialog interaktif dengan para petani untuk menyerap aspirasi dan memastikan dukungan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, forkopimda, penyedia sarana produksi pertanian, serta pelaku usaha alsintan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.
- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan pangan strategis, salah satunya melalui kegiatan Penanaman Jagung Serentak di lahan pondok pesantren wilayah Jawa Timur yang dilaksanakan di Desa Boyolangu, Kecamatan Giri, pada 6 Agustus 2025. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan penting yang berperan besar dalam menopang kebutuhan konsumsi masyarakat serta bahan baku pakan ternak. Melalui penanaman jagung secara serentak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya meningkatkan volume produksi jagung daerah agar pasokan tetap terjaga dan berkesinambungan, sehingga potensi gejolak harga akibat keterbatasan pasokan dapat ditekan. Kegiatan ini mencerminkan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, petugas lapang pertanian, serta masyarakat pondok pesantren. Pemanfaatan lahan pesantren untuk kegiatan pertanian produktif turut memperluas basis produksi jagung dan memperkuat ketahanan pangan berbasis kemandirian masyarakat. Dengan bertambahnya luas tanam dan meningkatnya produksi jagung, rantai pasok komoditas pangan di Banyuwangi menjadi lebih stabil. Stabilitas pasokan tersebut berkontribusi langsung dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan di pasar, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi daerah, khususnya pada kelompok bahan pangan.
- d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat ketersediaan pasokan pangan daerah melalui pengembangan pertanian modern dan pemberdayaan petani muda. Salah

satu upaya konkret dilakukan melalui program Jagoan Tani, yang mendorong lahirnya wirausaha pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Keberhasilan Saiful Bahri dan Ferdiansyah, dua petani muda dari Kecamatan Glenmore, dalam mengembangkan budidaya selada hidroponik menjadi bukti nyata efektivitas program tersebut. Produksi selada yang dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem hidroponik mampu menghasilkan panen harian secara stabil, sehingga membantu menjaga pasokan komoditas hortikultura di Banyuwangi, khususnya untuk kebutuhan rumah makan, gerai kebab, dan toko salad. Model pertanian hidroponik yang dikembangkan tidak bergantung pada musim, memiliki siklus panen yang cepat, serta kualitas produk yang seragam. Hal ini berkontribusi langsung terhadap kestabilan pasokan pangan, sekaligus mengurangi potensi gejolak harga akibat keterbatasan produksi di sektor pertanian konvensional. Melalui dukungan akses permodalan, pendampingan keterampilan, serta perluasan jejaring pasar yang difasilitasi program Jagoan Tani, Pemkab Banyuwangi mendorong peningkatan kapasitas produksi petani lokal. Kemitraan antara petani hidroponik juga memperkuat rantai pasok, sehingga ketersediaan selada dapat terjaga secara kontinu, baik untuk pasar lokal maupun regional. Pengembangan pertanian berbasis teknologi merupakan strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. Dengan semakin banyaknya petani muda yang terjun ke sektor pertanian modern, Banyuwangi diharapkan mampu menjaga kecukupan pasokan pangan, menekan risiko kelangkaan, serta mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.

- e. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui berbagai program peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan desa. Salah satu langkah strategisnya adalah pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi kawasan pertanian produktif berbasis wanatani (agroforestry) dan pengembangan Eco Space Desa Damai Tangguh Perubahan Iklim. Program yang dijalankan Wahid Foundation dengan dukungan Pemerintah Denmark ini menyasar 300 perempuan di tiga desa, yaitu Bangsring, Grajagan, dan Barurejo. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi ekologis, namun juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, yang merupakan salah satu pilar utama pengendalian inflasi. Pemanfaatan lahan bekas tambang pasir seluas 3 hektar di Desa Bangsring untuk penanaman 300 bibit petai dan alpukat mampu meningkatkan suplai hasil pertanian jangka menengah dan panjang. Seiring berjalannya waktu, tambahan produksi komoditas pertanian ini diproyeksikan akan memperluas sumber pasokan lokal sehingga membantu menekan potensi kenaikan harga akibat terbatasnya pasokan. Selain itu, melalui program Eco Space, masyarakat terutama perempuan dibekali keterampilan budidaya sayuran, peternakan kecil, serta pembuatan pupuk organik berbasis limbah rumah tangga. Aktivitas ini mendorong munculnya sumber pangan alternatif di tingkat rumah tangga dan desa, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar daerah dan menekan tekanan inflasi dari kelompok bahan pangan bergejolak. Dengan bertambahnya produksi pangan berbasis komunitas serta meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga, diharapkan dapat memperkuat fondasi stabilitas harga di tingkat lokal.
- f. Pemkab Banyuwangi terus berupaya agar para petani di Banyuwangi mengurangi ketergantungan pupuk kimia, dengan perlahan beralih ke pupuk organik. Di tiap program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Bupati bersama Dinas Pertanian dan Pangan selalu bertemu kelompok tani dan mendorong agar petani menggunakan sistem pertanian organik. Kini telah banyak kelompok tani yang memproduksi pupuk organik sendiri, dengan memanfaatkan limbah organik yang ada di lingkungan sekitar. Sudah banyak kelompok tani di Banyuwangi yang berhasil menerapkan penggunaan pupuk

organik bahkan telah memiliki sertifikasi. Dengan pupuk organik, selain mampu menekan biaya produksi, juga mampu meningkatkan produksi petani serta lebih menyuburkan tanah. Karena itu Dinas Pertanian dan Pangan beserta para jajarannya terus melakukan pendampingan dan pelatihan agar para petani bisa memproduksi dan beralih ke pupuk organik. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) rutin melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik di wilayah kerja mereka. Saat ini sudah banyak petani yang mengurangi dosis atau bahkan benar-benar beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Penggunaan organik bisa mengurangi 30 hingga 50 persen biaya produksi petani, sehingga keuntungan petani juga meningkat.

- g. Bupati Banyuwangi kembali menekankan kepada segenap jajaran untuk menjaga kecukupan air irigasi sehingga tidak mengganggu produksi pangan. OPD diminta untuk cek di lapangan masing-masing. Dinas PU pengairan terus memantau debit air di dam-dam dan bendungan untuk memastikan sawah teraliri air dengan baik. Dinas Pertanian juga mengecek produksi beras karena kemungkinan produksi padi tidak bisa seproduktif sebelumnya, walaupun posisi stok beras masih surplus hingga akhir tahun ini. Data Dinas PU Pengairan menunjukkan, meski kondisi debit air di sejumlah aliran irigasi lebih kecil dibanding waktu normal, namun tampungan air di sejumlah dam di Banyuwangi relatif mencukupi. Hasil pantauan di lapangan, saat ini reservoir di sejumlah dam bisa terbilang aman. Petani yang menanam padi masih bisa melanjutkan aktivitasnya, namun petani diimbau untuk menanam varietas padi yang toleran terhadap kekurangan air. Sejumlah langkah antisipatif yang diambil Dinas PU Pengairan bersama dinas Pertanian diantaranya dengan mengimplementasikan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang disusun berdasar kondisi ketersediaan air irigasi. Dengan luasan lahan RTTG mencapai 7.408 ha sawah padi. Meski dengan kondisi kekeringan saat ini membutuhkan pasokan air hingga 1,5 kali lipat dari kondisi normal, kapasitas dam yang ada masih cukup bisa mengairi sawah hingga akhir tahun. Petani diharapkan bisa menghemat penggunaan air. Apabila ada kekurangan segera dilaporkan agar bisa disuplai dari irigasi terdekat.
- h. Dinas PU Pengairan terus mengembangkan inovasi **WARM (Water Resources Management) SYSTEM** yang mempermudah pencatatan data dukung untuk pengelolaan sumber daya air seperti data curah hujan, data debit, data ketersediaan air, data kebutuhan air serta data ketinggian sedimen yang sudah mengendap dalam bangunan air secara digital. Awalnya Dinas PU Pengairan masih menggunakan metode manual dalam pencatatan data dukung untuk pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data di Lingkup Kabupaten Banyuwangi bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dibutuhkan data dukung yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama dan berkelanjutan, sehingga data dukung pengelolaan sumber daya air harus digitalisasi. Pengendapan sedimen pada tampungan air selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan luapan air akibat semakin kecilnya ruang tampungan dan saluran air. Melalui Program WARM SYSTEM dapat mengoptimalkan pencatatan data dukung pengelolaan sumber daya air di Dinas PU Pengairan agar memudahkan semua kalangan dalam mengakses data ketersediaan dan kebutuhan air serta memberikan informasi mengenai kapan saluran/tampungan air membutuhkan pengerukan sedimen secara berkala agar tidak terjadi pengendapan sedimen yang berlebihan. Dalam penerapan program ini Dinas PU Pengairan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yaitu Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian serta Dinas Pertanian dan Pangan. Kabupaten Banyuwangi memiliki 390 bendung dan 83 stasiun hujan. Para penjaga pintu air bertugas melakukan pencatatan debit air di pintu bendung setiap hari dan mencatat curah hujan di setiap kejadian hujan. Dari yang awalnya dicatat dengan manual, melalui WARM SYSTEM

pencatatan dan analisisnya dilakukan secara digital. Pencatatan data dukung pengelolaan sumber daya air akan diperoleh secara digital dan *realtime* serta dapat diakses oleh semua kalangan. Air irigasi yang akan disalurkan menjadi lebih optimal sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

- i. Pemkab Banyuwangi konsisten untuk terus berkomitmen memajukan sektor pertanian dan pangan yang selama ini menjadi andalan daerah untuk mendorong perekonomian daerah. Selama ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan, khususnya aspek pemanfaatan pangan, Pemkab terus mengembangkan sejumlah inovasi diantaranya Sister Say (Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayur). Ini adalah inovasi penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga desa yang rawan stunting. Inovasi ini mengoptimalkan aplikasi konsep urban farming yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Di lahan tersebut tersedia tanaman sayuran, buah-buahan, serta perikanan sistem bioflok dan kandang ternak dalam satu lahan. Selain itu, Pemkab rutin menggelar program inkubasi sektor pertanian bagi generasi muda yang diberi nama Jagoan Tani. Disediakan hadiah berupa modal ratusan juta rupiah bagi pemenangnya. Banyuwangi juga memberikan fasilitasi perizinan bidang ketahanan pangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Imam Pesat (Implementasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/PSAT). Dengan memiliki nomor registrasi, produk pangan tersebut lebih terjamin kualitasnya. Selanjutnya produk tersebut diberikan pendampingan dan diarahkan untuk masuk pada e-katalog lokal guna memperluas pasarnya. Banyuwangi juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan melalui Festival Pangan Nonberas Nonterigu/ Fepanora. Kegiatan ini mengedukasi masyarakat agar lebih kreatif mengolah makanan. Tidak selalu dari beras dan terigu, makanan lezat dan bergizi seimbang juga bisa diolah dari berbagai bahan lain di sekitar kita.
- j. Pemkab Banyuwangi terus mengoptimalkan layanan **PAS KONTAN(Pelayanan Smart Konsultasi Pertanian Online)** dan **E-BILAPERDU** sebagai strategi proaktif untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas pertanian, hortikultura, dan peternakan. **PAS KONTAN** adalah platform digital yang diluncurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi untuk mempermudah petani mendapatkan konsultasi teknis, mengatasi permasalahan pertanian, dan mendapatkan informasi terkini secara daring. Aplikasi ini dirancang untuk merespons kebutuhan petani dengan cepat, bahkan kurang dari 24 jam. Sedangkan **E-BILAPERDU (Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu)** adalah layanan jemput bola atau penyuluhan keliling yang didukung oleh tenaga ahli. E-BILAPERDU berfokus pada penanganan masalah lapangan seperti serangan hama, penyakit ternak, dan kebutuhan teknis di lapangan. Optimalisasi kedua layanan ini bertujuan meningkatkan produktivitas hasil tani/ternak, yang secara langsung menjamin ketersediaan pasokan pangan di tingkat daerah. Dengan pasokan yang stabil, laju inflasi yang sering dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok (seperti beras, cabai, dan bawang) dapat ditekan. Upaya ini selaras dengan target Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan produksi padi (target 800 ribu ton pada 2025) dan memperkuat posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk memanfaatkan teknologi dan layanan langsung (jemput bola) guna mempermudah akses petani terhadap solusi pertanian modern.
- k. Dinas Pertanian dan Pangan terus berupaya meningkatkan produksi hasil peternakan dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi peternak pemula maupun penguatan kemampuan peternak lama sehingga bisa lebih meningkatkan kemampuan dalam peningkatan produksi hasil peternakan bagi kecamatan maupun SDM di 25 (dua puluh lima) kecamatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya kegiatan ini

terjadi peningkatan produksi daging sebesar 11.445.111 kg; peningkatan produksi telur sebesar 12.123.270 kg serta mulai tumbuhnya usaha peternakan yang baru sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan populasi ternak. Dengan begitu, Banyuwangi secara komparatif mampu menyumbang ketersediaan stok produksi bibit ternak di regional Jawa Timur maupun Nasional. Ketersediaan stok produksi yang stabil memperkecil kemungkinan terjadinya fluktuasi harga produk bahan asal hewan yang terdiri dari daging, telur dan susu.

- l. Upaya pengembangan sektor perikanan terus dilakukan oleh Dinas Perikanan. Salah satunya melalui penebaran 4.000 benih ikan nila di lahan mina padi sistem tanam jajar legowo (Tajarwo) yang berada di Dusun Glowong, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran. Kegiatan ini melibatkan dua kelompok masyarakat yakni Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Banyu Agung Raya dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar) Glowong Glowong. Penebaran dilakukan langsung di areal sawah mina padi yang selama ini dimanfaatkan secara produktif oleh warga sekitar. Program ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun desa tematik berbasis perikanan terpadu. Kolaborasi antara pembudidaya dan pengolah ikan menjadi kunci keberhasilan pengembangan potensi desa. Selain kegiatan tebar benih, juga dilaksanakan sosialisasi kepada Poklasar Glowong terkait rencana pemberdayaan. Salah satunya melalui pelatihan pengolahan ikan agar hasil budidaya bisa diolah menjadi produk siap jual. Dinas Perikanan membantu fasilitasi pelatihan, termasuk pengemasan dan pemasaran produk. Harapannya produk olahan dari desa ini bisa dikenal luas. Pendekatan mina padi memberikan manfaat ganda bagi petani dan pembudidaya ikan. Selain meningkatkan hasil panen padi, kehadiran ikan juga membantu ekosistem sawah tetap sehat. Dengan dukungan dari kelompok masyarakat yang aktif, Dinas Perikanan optimis bahwa Desa Wringinagung dapat berkembang sebagai sentra ekonomi baru berbasis sumber daya lokal. Program ini sejalan dengan visi Banyuwangi untuk memperkuat ketahanan pangan, menciptakan peluang usaha, serta membangun kemandirian desa melalui sektor perikanan.
- m. Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Gerai Olahan Ikan Auto 2000. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan program pengembangan usaha olahan ikan berjalan optimal di lapangan. Monitoring dilakukan langsung ke lokasi usaha guna melihat pencapaian, tantangan, serta potensi pengembangan gerai ke depan. Evaluasi ini penting agar program yang dijalankan tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil. Tim akan melihat langsung bagaimana kondisi gerai, bagaimana produk dipasarkan, dan kendala apa yang mereka hadapi. Dari situ bisa disusun strategi lanjutan yang lebih tepat sasaran. Gerai Auto 2000 merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis hasil perikanan. Produk yang dihasilkan tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi berpotensi masuk ke pasar yang lebih luas. Dalam kegiatan tersebut, tim P2HP juga berdialog dengan pelaku usaha terkait proses produksi, packaging, serta daya tarik produk di pasar. Dinas Perikanan mendorong terus agar pelaku usaha terus meningkatkan standar mutu produk dan inovasi olahan. Upaya ini sejalan dengan program daerah dalam penguatan UMKM sektor perikanan sebagai pilar ekonomi masyarakat pesisir. Dengan kegiatan ini, Pemkab Banyuwangi berharap potensi perikanan tidak hanya berhenti di tangkapan dan budidaya, tetapi mampu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang memperkuat kemandirian ekonomi lokal.
- n. Selanjutnya, untuk mendukung program pengembangan, pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan, maka Dinas Perikanan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi startup usaha pengolah dan pemasar ikan
 2. Pengukuhan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar)
 3. Pembinaan dan pendampingan mutu bagi pengolah dan pemasar (Poklahsar)
 4. Pendampingan kelembagaan kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar)
 5. Optimalisasi sentra pasar Perikanan
 6. Membangun Kantin GEMARIKAN SEKOLAH
 7. Bantuan sarpras bagi kelompok pengolah dan pemasar ikan
 8. Mengikuti pameran hasil produk Perikanan
 9. Mengikuti lomba masak olahan ikan tingkat Provinsi di Surabaya
 10. Melaksanakan Fish Market festival
 11. Festival Nelayan Tangguh
 12. Paket Gemarikan untuk stunting
 13. Pelatihan olahan ikan yang diikuti Kader PKK, difabel dan istri nelayan
 14. Fasilitasi KUSUKA, NIB.
- o. Pemkab Banyuwangi berkolaborasi dengan Bulog, Bank Indonesia Jember, serta pelaku usaha lokal, melaksanakan operasi pasar yang rutin digelar di berbagai kecamatan dan desa. Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi, terutama dengan memastikan suplai beras medium, beras SPHP, dan beras premium tetap terjaga dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau. Dalam operasi pasar tersebut, pemerintah turut memperkuat pasokan komoditas pangan lainnya, seperti telur yang didistribusikan sekitar 450 kilogram per hari selama tiga hari. Penambahan distribusi telur secara intensif ini berperan penting dalam menjaga harga telur yang sering menjadi penyumbang inflasi pada kelompok bahan makanan. Upaya ini membantu menstabilkan harga di tingkat konsumen sekaligus menjamin kebutuhan protein masyarakat tetap terpenuhi. Selain beras dan telur, operasi pasar juga memastikan ketersediaan minyak goreng, tepung, gula pasir, serta LPG 3 kg. Ketersediaan komoditas strategis ini menjadi faktor krusial dalam menahan tekanan inflasi, terutama pada komoditas yang rawan mengalami fluktuasi harga. Dengan harga yang lebih terjangkau dan pasokan yang aman, Pemkab Banyuwangi menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
- p. Strategi pengendalian inflasi terus diperkuat melalui peningkatan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan, salah satunya dengan mendorong penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember dalam penyelenggaraan Seminar Nasional UMKM Go Export: Digital Drive, Global Thrive yang digelar di Banyuwangi. Melalui kegiatan tersebut, UMKM dibekali pemahaman komprehensif terkait aturan ekspor, tren pasar global, serta strategi pemasaran internasional. Penguatan kapasitas ini mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produksi. Dengan meningkatnya kemampuan UMKM dalam memproduksi produk olahan bernilai tambah dan komoditas berorientasi ekspor, ketersediaan pasokan barang di tingkat daerah menjadi lebih terjaga dan beragam, sehingga turut menopang stabilitas harga. Selain itu, orientasi ekspor menuntut adanya kontinuitas suplai bahan baku. Kondisi ini mendorong terbentuknya rantai pasok yang lebih tertata dan berkelanjutan, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Petani, nelayan, dan pelaku usaha penyedia bahan baku memperoleh kepastian serapan produksi, sehingga pasokan komoditas strategis di daerah dapat terjaga secara konsisten sepanjang tahun. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang bahwa penguatan UMKM ekspor tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja perdagangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi. Dengan pasokan yang memadai, stabil, dan berkelanjutan, tekanan

harga akibat gangguan distribusi maupun kelangkaan barang dapat diminimalkan.

- q. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan ketersediaan pasokan barang dan produk unggulan lokal, yang terintegrasi dalam strategi *city branding* Keberhasilan Banyuwangi membangun citra daerah yang kuat dan kompetitif, sebagaimana dipelajari dalam *Executive Education Program* (EEP) yang diselenggarakan oleh *City Branding Institute*, telah memberikan dampak nyata terhadap penguatan struktur ekonomi lokal. Melalui *city branding* yang terencana dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan daya saing UMKM lokal. Peningkatan reputasi daerah mendorong perluasan pasar, meningkatnya permintaan, serta tumbuhnya kepercayaan konsumen terhadap produk Banyuwangi. Kondisi ini secara langsung mendorong UMKM untuk meningkatkan volume dan kontinuitas produksi, sehingga ketersediaan barang di pasar lokal tetap terjaga. Selain itu, penguatan *city branding* yang mengangkat potensi lokal, budaya, dan kualitas layanan publik turut memperkuat eksistensi produk unggulan daerah. Produk-produk Banyuwangi tidak hanya dikenal sebagai komoditas wisata, tetapi juga sebagai barang konsumsi dan produk bernilai tambah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada terjaganya pasokan barang, khususnya produk lokal, sehingga dapat meredam potensi gejolak harga. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang bahwa *city branding* bukan sekadar strategi promosi, melainkan instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berdampak pada stabilitas pasokan. Dengan meningkatnya produksi UMKM dan tersedianya produk unggulan daerah secara memadai, tekanan inflasi akibat keterbatasan pasokan dapat diminimalkan.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjelang penutupan total Jalur Gunitir yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Penutupan jalur strategis tersebut dilakukan selama dua bulan, mulai 24 Juli hingga 24 September 2025, untuk mendukung perbaikan jalan dan jembatan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali. Sebagai bentuk mitigasi dampak terhadap distribusi logistik dan transportasi antardaerah, Dinas Perhubungan Banyuwangi segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk PT KAI Daerah Operasi 9 Jember dan pengelola armada bus. Langkah ini bertujuan memastikan arus pergerakan orang dan barang tetap berjalan meskipun jalur darat utama ditutup sementara. Melalui koordinasi tersebut, dilakukan penambahan titik pemberhentian kereta api di Stasiun Garahan dan Stasiun Silo di Kabupaten Jember, serta optimalisasi Stasiun Kalibaru di Banyuwangi sebagai simpul transportasi alternatif. Kebijakan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus menjaga kesinambungan distribusi barang kebutuhan pokok dan logistik antarwilayah. Selain moda kereta api, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga berkoordinasi dengan pengelola armada bus untuk penyesuaian rute dan titik keberangkatan, termasuk pengalihan trayek agar tetap terhubung dengan jaringan kereta api. Pengaturan jalur alternatif ini bertujuan mencegah terhambatnya distribusi akibat penutupan jalan, sekaligus menekan potensi kenaikan biaya logistik yang dapat berdampak pada harga barang di pasaran. Melalui penguatan koordinasi transportasi darat dan kereta api, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwa penutupan Jalur Gunitir tidak mengganggu kelancaran distribusi. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah, dengan menjaga arus pasokan barang tetap lancar, stabil, dan terjangkau bagi

masyarakat.

- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat menjaga kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat menyusul rusaknya Jembatan Sungai Lembu yang menghubungkan Desa Sumberagung dengan Desa Kandungan dan Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Jembatan tersebut merupakan akses utama pergerakan masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian, perikanan, serta kebutuhan pokok antar desa. Kerusakan jembatan akibat tingginya debit air sungai berpotensi menghambat arus distribusi barang dan meningkatkan biaya transportasi, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan harga di tingkat masyarakat. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas PU CKPP segera menyiapkan jembatan darurat yang dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Penyediaan akses sementara ini bertujuan agar mobilitas warga tetap terjaga dan distribusi barang kebutuhan harian tidak terhenti. Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, pemerintah daerah menyiapkan jalur alternatif agar arus logistik tetap berjalan. Langkah cepat penanganan infrastruktur ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui aspek kelancaran distribusi. Dengan memastikan akses penghubung antarwilayah tetap berfungsi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mencegah terjadinya hambatan distribusi yang dapat menyebabkan kelangkaan barang maupun kenaikan harga akibat biaya logistik yang meningkat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan kajian teknis untuk menentukan penanganan permanen terhadap Jembatan Sungai Lembu, baik melalui perbaikan struktur maupun pembangunan jembatan baru. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi jangka panjang serta mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Banyuwangi.
- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah-langkah responsif dan kolaboratif untuk menjaga kelancaran distribusi logistik menyusul terjadinya kemacetan di akses menuju Pelabuhan Ketapang. Pelabuhan tersebut merupakan simpul strategis distribusi barang dan mobilitas orang antara Jawa dan Bali, sehingga gangguan operasional berpotensi berdampak pada kelancaran pasokan dan stabilitas harga. Untuk mengurai kemacetan akibat keterbatasan kapal penyeberangan dan faktor cuaca, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Polresta Banyuwangi mendirikan empat posko gabungan serta menyiagakan petugas dari berbagai perangkat daerah di sejumlah titik rawan. Upaya ini bertujuan memperlancar arus kendaraan, khususnya truk logistik yang mengangkut bahan pokok, bahan bangunan, dan kebutuhan industri antarwilayah. Selain pengaturan lalu lintas, Pemkab Banyuwangi juga memberikan dukungan sosial dengan membagikan makanan kepada para sopir truk yang harus mengantre lama. Langkah ini membantu menjaga kondisi pengemudi agar tetap prima, sehingga distribusi barang dapat segera dilanjutkan tanpa gangguan lanjutan yang berpotensi meningkatkan biaya logistik. Pemerintah daerah juga melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait dari hulu hingga hilir untuk percepatan penanganan kemacetan, termasuk koordinasi operasional penyeberangan. Meskipun kewenangan pengelolaan pelabuhan berada pada pemerintah pusat, kehadiran aktif Pemkab Banyuwangi merupakan bentuk mitigasi dampak ekonomi agar distribusi barang tetap berjalan dan tekanan inflasi akibat keterlambatan pasokan dapat diminimalkan.
- d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengupayakan kelancaran distribusi barang dan mobilitas ekonomi antarwilayah melalui koordinasi intensif dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali terkait percepatan pembukaan Jalur Gunitir, yang merupakan penghubung utama antara Banyuwangi dan Jember. Percepatan pembukaan jalur yang semula direncanakan hingga akhir September menjadi awal September 2025 merupakan langkah strategis untuk meminimalkan dampak gangguan distribusi akibat penutupan jalan. Jalur Gunitir memiliki peran vital

sebagai urat nadi pergerakan logistik, termasuk distribusi bahan pangan, kebutuhan pokok, dan barang industri antarwilayah. Dengan dibukanya jalur lebih cepat, arus barang dapat kembali berjalan lancar dan risiko keterlambatan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga dapat ditekan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara aktif menjalin komunikasi dan mendorong percepatan pekerjaan bersama BBPJT Jatim-Bali, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kesinambungan distribusi dan menekan biaya logistik yang timbul akibat penggunaan jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan waktu. Pembukaan fungsional (open traffic) Jalur Gumitir, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan pengaturan lalu lintas, diharapkan segera memulihkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi kedua wilayah. Kelancaran distribusi ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah, karena memastikan pasokan barang tetap tersedia tepat waktu dan harga di tingkat konsumen tetap stabil.

- e. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, sedang tancap gas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui program pavingisasi. Proyek ini ditargetkan mampu merampungkan pembangunan jalan sepanjang 359.025 meter hingga akhir tahun 2025. Pembangunan jalan paving ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas, tapi juga untuk mendorong peningkatan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan permukiman padat. Saat ini telah rampung dengan panjang jalan yang terbangun mencapai 43.495,3 meter. Demi mengejar target tersebut, seluruh jajaran Dinas PU CKPP Banyuwangi kini tengah mengebut pengerjaan fisik di lapangan. Tidak hanya itu, kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan juga menjadi prioritas Dinas PU CKPP Banyuwangi, agar manfaat dari program ini segera bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Dipastikan setiap kegiatan pavingisasi dijalankan dengan tepat mutu, serta tepat waktu. Harapannya, jalan yang terbangun benar-benar bermanfaat bagi warga, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
- f. Pemkab Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur meski di tengah efisiensi anggaran. Pada tahun 2025 ini direncanakan akan ada pembangunan jalan sepanjang 700 Km di seluruh wilayah Banyuwangi, serta pembangunan dan rehabilitasi 23 jembatan, dengan fokus pada skala prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini sebagai komitmen daerah untuk memberikan akses jalan yang memadai bagi warga. Tentunya dengan anggaran daerah yang terbatas, dan mempertimbangkan program lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya, maka jalan dan jembatan dibangun secara bertahap. Salah satu jembatan yang tahun ini selesai dibangun, adalah jembatan yang menghubungkan Kecamatan Glenmore-Tegalsari. Jembatan ini menjadi akses warga yang bekerja di areal Perkebunan Kalitelepak PTPN 1 Regional 5. Dengan adanya jembatan ini, khususnya warga perkebunan di Desa Tulungrejo jadi lebih dekat dan mudah untuk mengakses berbagai fasilitas baik pendidikan, kesehatan maupun perekonomian, di Kecamatan Tegalsari atau Genteng, karena kalau harus lewat Glenmore lebih jauh jaraknya. Dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2024, Pemkab Banyuwangi telah berhasil membangun dan merehabilitasi sebanyak 222 jembatan.
- g. Jalan merupakan infrastruktur yang vital untuk memperlancar distribusi pangan. Tidak hanya antardaerah, melainkan dari hulu ke hilir, dari sawah sampai ke tempat penggilingan padi. Untuk itulah penting pula memperhatikan pembangunan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT) atau jalan pertanian. JUT akan

memperluas daya jangkau distribusi hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani di tingkat Dusun hingga Desa. JUT akan mempermudah akses untuk menjangkau areal pertanian. Mobil angkutan dan alsintan dapat menjangkau areal persawahan dan dapat dioperasikan dengan baik. Selain itu, adanya JUT akan memutus besarnya biaya produksi dan memberi banyak manfaat sehingga penghasilan petani bisa bertambah. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengawal misi ini dan berbagi peran dengan pemerintah desa agar bisa menyediakan aksesibilitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, khususnya para petani, dengan baik.

- h. Pemkab Banyuwangi menjadikan pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi salah satu prioritas. Tidak sekedar untuk memudahkan mobilitas warga, peningkatan aksesibilitas juga akan berdampak pada perbaikan perekonomian masyarakat. Melalui pembangunan dan perbaikan jalan, distribusi hasil pertanian, produk UMKM dan lain sebagainya akan semakin mudah dan cepat. Peningkatan infrastruktur jalan di Banyuwangi berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari perekonomian hingga keamanan. Ketika jalan bagus, maka perekonomian akan lancar sehingga memunculkan kenyamanan dan diharapkan pula keamanan. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi perhatian agar perekonomian bisa bergerak tidak hanya siang hari tapi juga di malam hari. Kemudahan mobilitas tersebut akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Waktu maupun biaya distribusi juga lebih efisien. Targetnya, semua kecamatan harus merasakan akses jalan, baik jalan poros maupun jalan lingkungan.

4. Komunikasi Efektif

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui komunikasi kebijakan yang terkoordinasi, transparan, dan berbasis data, salah satunya dengan menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM). Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan arah kebijakan pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan implementasi 9 langkah TP2ED. Penyampaian kebijakan ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk komunikasi efektif agar setiap perangkat daerah dan lembaga terkait memiliki pemahaman yang sama serta bergerak dalam satu narasi kebijakan ekonomi daerah. Komunikasi lintas kelembagaan juga diperkuat melalui paparan dari Bank Indonesia Jember, yang menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga pangan, menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025-2027, serta mendorong penguatan sektor riil melalui UMKM. Penyampaian arah kebijakan moneter dan pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dalam forum HLM menjadi sinyal kuat dan kredibel bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi, sehingga ekspektasi inflasi dapat terjaga. Sementara itu, BPS Banyuwangi menyampaikan data dan capaian ekonomi daerah secara faktual dan terukur. Melalui *High Level Meeting* ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan terintegrasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, serta seluruh pemangku kepentingan.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengendalian inflasi daerah tidak hanya melalui intervensi harga dan pasokan, tetapi juga dengan memperkuat komunikasi kebijakan yang efektif, terarah, dan partisipatif. Salah satu wujudnya adalah pelaksanaan program inkubasi wirausaha Jagoan Banyuwangi, yang menjadi ruang dialog, edukasi, dan kolaborasi bagi generasi muda pelaku usaha. Melalui Jagoan Banyuwangi, pemerintah daerah secara aktif menyampaikan pesan strategis mengenai

pentingnya penguatan usaha lokal, inovasi produk, dan perluasan jejaring pasar. Komunikasi ini dilakukan secara langsung melalui kelas mentoring, sesi offline, pitching day, serta pendampingan berkelanjutan oleh para mentor dan praktisi usaha. Pola komunikasi dua arah tersebut memastikan informasi kebijakan ekonomi daerah dapat dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku usaha muda. Program ini juga menjadi sarana komunikasi publik pemerintah untuk membangun optimisme dan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim ekonomi daerah. Kisah para peserta, seperti pelaku usaha jasa persewaan, agribisnis bibit buah, hingga sektor kreatif lainnya, disampaikan secara terbuka sebagai inspirasi dan pesan bahwa pemerintah hadir mendukung pertumbuhan usaha lokal. Komunikasi yang positif dan konsisten ini penting untuk menjaga ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat agar tetap kondusif, sehingga tidak memicu kepanikan atau persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi dan harga. Jagoan Banyuwangi dirancang sebagai wadah komunikasi strategis antara pemerintah dan generasi muda untuk mendorong lahirnya wirausaha yang adaptif dan berdaya saing. Dengan penyampaian informasi yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha untuk melakukan scale up usaha, memperluas pasar, serta membangun kolaborasi yang menopang stabilitas ekonomi daerah.

- c. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan kesuburan tanah melalui pembinaan para penyuluh pertanian di lapangan. Sebagai upaya meningkatkan keterampilan petani, penyuluh pertanian melaksanakan pembinaan untuk mempertahankan kesuburan tanah sementara ketersediaan pupuk bersubsidi semakin berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi, penyuluh dan para petani berinisiatif dalam mengatasi ketersediaan pupuk bersubsidi melalui praktek pembuatan pupuk organik. Dalam setiap pembinaan dan kesempatan penyuluh sebagai sobat petani berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Sebenarnya petani masih punya pilihan lain selain membeli pupuk non subsidi apabila kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Pilihan itu adalah membuat pupuk sendiri secara organik, baik pupuk cair maupun padat. Semua bahan untuk membuat pupuk sudah tersedia di sekitar kita, sehingga mestinya kelangkaan pupuk bersubsidi tidak menjadi persoalan lagi jika semua potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Program pertanian organik ini merupakan langkah strategis bagi pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya pendampingan dari penyuluh melalui metode praktek ini, para petani akan mampu menghadapi tantangan modern dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Genta Organik menjadi solusi inovatif dalam pengembangan pertanian organik. Melalui penyuluh dalam pelaksanaan pembinaan kelompok, diharapkan para petani dapat beralih ke pertanian organik yang lebih berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan pangan.
- d. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Kegiatan survey harga juga melibatkan BPS Banyuwangi guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran.
- e. Menginformasikan data harian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya juga disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui tpid.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang *diupdate* secara harian. Saat ini informasi harga tersebut sudah bisa diakses melalui Aplikasi Smartkampung pada

gadget setiap masyarakat Banyuwangi.

- f. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
- g. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. **Efektivitas Intervensi Pasar:** Operasi Pasar di Desa Gintangan dan wilayah lainnya terbukti efektif meredam kepanikan konsumen (*panic buying*). Penyediaan komoditas spesifik (telur, beras SPHP, LPG 3kg) di bawah harga pasar memberikan perlindungan langsung pada daya beli rumah tangga rentan di tingkat desa.
- b. **Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak:** Penyaluran 49,05 ton beras dan komoditas lain di 25 kecamatan menunjukkan jangkauan logistik yang luas. Realisasi beras SPHP sebesar 538,58 ton (hingga Agustus) menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga beras di tengah kondisi Banyuwangi sebagai lumbung pangan.
- c. Pemkab Banyuwangi secara intens akan terus menggandeng lintas elemen untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok dengan menggelar operasi pasar. Dalam pelaksanaan operasi pasar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), BULOG dan sejumlah toko modern.
- d. **Penguatan Toko Penyeimbang (TOP Si Wangi):** Transformasi toko milik warga menjadi mitra Bulog merupakan langkah preventif yang sangat strategis. Keberadaan TOP Si Wangi di pasar-pasar memperpendek jarak akses masyarakat terhadap harga subsidi tanpa harus menunggu jadwal Operasi Pasar keliling.
- e. **Pemberdayaan Ekonomi (Kanggo Riko & Wenak):** Program ini berhasil mengalihkan strategi pengendalian inflasi dari sekadar bantuan konsumtif menjadi penguatan sisi pendapatan. Pemberian bantuan alat usaha dan modal senilai Rp1 juta - Rp2,5 juta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dalam menghadapi fluktuasi harga.
- f. **Kemandirian Pangan Keluarga (P3KB):** Inisiasi budidaya tanaman polybag (cabai, tomat, terong) efektif mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap pasar untuk komoditas hortikultura yang sering mengalami volatilitas harga tinggi.
- g. **Program Makan Bergizi Gratis (MBG):** Penambahan SPPG menjadi 6 unit dengan bahan baku lokal menciptakan *captive market* bagi petani. Hal ini tidak hanya menjamin gizi siswa, tetapi juga menstabilkan harga di tingkat produsen karena adanya permintaan tetap dari dapur umum.
- h. **Digitalisasi Bansos (Parlinsos):** Keberhasilan sebagai *piloting* nasional Bansos digital memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini krusial sebagai bantalan ekonomi (penebalan daya beli) saat terjadi lonjakan harga pangan mendadak.
- i. **Peningkatan Daya Saing UMKM:** Seminar "Go Export" bersama BI Jember berhasil meningkatkan standar kualitas produk lokal. Produk yang kompetitif secara global

cenderung lebih stabil secara harga di pasar domestik karena efisiensi produksi yang lebih baik.

- j. **Strategi City Branding:** Inovasi *branding* melalui EEP terbukti memperluas pangsa pasar UMKM ke luar daerah/wisatawan, yang meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya produksi per unit (*economy of scale*), sehingga harga tetap terjangkau.
- k. **Gerakan Belanja "Tanggal Cantik":** Instruksi belanja di pasar tradisional dan warung rakyat via ojek online terbukti efektif menjaga perputaran stok barang. Kelancaran sirkulasi barang ini mencegah spekulasi harga akibat stok yang mengendap di tingkat pedagang.
- l. Kebijakan perluasan Program Makan Bergizi Gratis efektif dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus menstabilkan permintaan komoditas melalui pembelian langsung dari produsen lokal. Namun, untuk menjaga dampak pengendalian inflasi secara berkelanjutan, diperlukan kesinambungan pasokan bahan baku, penguatan koordinasi antar-SPPG, serta pengendalian biaya operasional agar manfaat stabilisasi harga tetap optimal.
- m. Pemkab Banyuwangi akan terus menyalurkan Program Warung Naik Kelas (WeNak) untuk memperkuat perekonomian para pelaku usaha ultra mikro sebagai sarana menambah peralatan atau modal usaha. Program Wenak menyasar para pelaku usaha skala mikro yang masuk dalam data keluarga kurang mampu.
- n. Pemkab Banyuwangi akan terus mengoptimalkan peran Toko Pengendalian Inflasi Banyuwangi (TOP Si Wangi) dalam upaya menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok. Top Si Wangi berfungsi sebagai toko penyeimbang untuk mengantisipasi inflasi dan lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Ini menjadi salah satu cara agar saat terjadi kenaikan harga toko-toko ini bisa menjual bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
- o. Pemkab Banyuwangi akan terus menggulirkan berbagai program pemberdayaan dengan memperbanyak penerima bantuan penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM). Dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro, Pemkab Banyuwangi merancang berbagai program bantuan usaha mikro yang dinilai efektif. Seperti program Kanggo Riko, yang merupakan pemberian bantuan alat usaha kepada pelaku usaha mikro. Program ini sangat efektif mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
- p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan secara rutin harian akan terus melakukan pencatatan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya serta melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Hasil pencatatan itu dinilai sangat efektif sebagai mitigasi awal kenaikan harga di pasar sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut TPID.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. **Peran Dinas Teknis:** Sinergi antara Dinas Pertanian dan Perikanan dalam memantau data produksi hulu secara *real-time* menjadi dasar akurasi pengambilan kebijakan intervensi pasokan.
- b. **Optimalisasi UPJA Alsintan:** Mekanisasi melalui *Rice Transplanter* dan *Grain Seeder* terbukti mempercepat masa tanam MT III. Efisiensi waktu ini menjamin kesinambungan panen sehingga tidak terjadi celah kekurangan pasokan (*supply gap*).
- c. **Penanaman Jagung Serentak:** Pemanfaatan lahan pesantren di Desa Boyolangu

- memperluas basis produksi jagung. Hal ini vital untuk menjaga stabilitas harga pakan ternak lokal, yang secara tidak langsung mengendalikan harga daging dan telur ayam.
- d. **Inovasi Jagoan Tani (Hidroponik):** Keberhasilan produksi selada hidroponik harian membuktikan bahwa pertanian modern mampu menyediakan pasokan yang stabil, tidak bergantung musim, dan memenuhi standar kualitas sektor jasa boga.
 - e. **Pemanfaatan Lahan Marginal (Eco Space):** Transformasi lahan bekas tambang menjadi kawasan produktif (petai/alpukat) dan edukasi budidaya bagi perempuan memperkuat ketahanan pangan komunal dan diversifikasi sumber pangan lokal.
 - f. **Kemandirian Pupuk Organik:** Sosialisasi pupuk organik dalam program "Bunga Desa" berhasil menekan biaya produksi petani hingga 30-50%. Pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal menjaga margin keuntungan petani meski harga jual di pasar stabil.
 - g. **Manajemen Irigasi (RTTG):** Implementasi Rencana Tata Tanam Global di 7.408 ha sawah padi memastikan produksi tetap berjalan optimal di tengah penurunan debit air, sehingga stok beras hingga akhir tahun tetap surplus.
 - h. **Inovasi WARM SYSTEM:** Digitalisasi data debit dan sedimen air di 390 bendung memberikan transparansi distribusi air irigasi. Hal ini meminimalkan konflik perebutan air dan memastikan produktivitas lahan terjaga secara merata.
 - i. **Diversifikasi & Keamanan Pangan (Sister Say & Imam Pesat):** Integrasi ternak-ikan-sayur di desa stunting dan registrasi PSAT meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu pangan lokal, sekaligus memperluas akses pasar melalui e-katalog lokal.
 - j. **Layanan PAS KONTAN & E-BILAPERDU:** Respon konsultasi online kurang dari 24 jam dan penyuluhan keliling sangat efektif dalam mitigasi serangan hama/penyakit ternak, sehingga risiko gagal panen yang mengancam pasokan dapat diminimalisir sejak dini.
 - k. **Peningkatan Kompetensi Peternak:** Pelatihan bagi peternak di 25 kecamatan berkontribusi langsung pada peningkatan produksi daging dan telur nasional, memastikan Banyuwangi mandiri dalam pemenuhan protein hewani.

3. Kelancaran Distribusi

- a. **Efektivitas Monitoring Pasokan Terpadu:** Pengawasan rutin bersama Satgas Pangan di gudang Bulog dan pasar tradisional terbukti mampu mendeteksi dini hambatan distribusi. Evaluasi menunjukkan bahwa sinergi ini berhasil mencegah praktik penimbunan yang sering memicu kenaikan harga semu.
- b. **Manajemen Logistik Jalur Utama (Gumitir & Pelabuhan):** Kebijakan pengawalan distribusi pangan di Jalur Gumitir (jalur vital Banyuwangi-Jember) pasca pembukaan fungsional sangat efektif menekan biaya logistik. Pengaturan arus lalu lintas kendaraan pengangkut sembako meminimalisir risiko kerusakan komoditas *perishable* (mudah rusak) akibat keterlambatan.
- c. **Infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT):** Pembangunan 700 km jalan dan 23 jembatan memberikan dampak signifikan pada penurunan biaya angkut dari lahan pertanian ke pasar. Evaluasi menunjukkan efisiensi waktu distribusi meningkat, sehingga margin keuntungan petani terjaga tanpa harus menaikkan harga di tingkat konsumen.
- d. **Peran Lembaga Ekonomi Petani:** Melibatkan UMKM dan Korporasi Petani dalam rantai distribusi berhasil memotong peran tengkulak. Rantai pasok yang lebih pendek memastikan harga komoditas strategis di pasar tetap kompetitif.
- e. Pemkab Banyuwangi akan terus mencukupi Penerangan Jalan Umum (PJU) agar perekonomian bisa bergerak tidak hanya siang hari tapi juga di malam hari, sehingga perekonomian terus tumbuh.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan akan melanjutkan Pengembangan Jaringan Pemasaran Perdagangan Antar Daerah, untuk memperluas jaringan pemasaran potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi yang meliputi produk-produk pertanian, perkebunan dan produk IKM.

4. Komunikasi Efektif

- a. **Diseminasi Harga melalui Digitalisasi Pasar:** Pemanfaatan videotron di 7 pasar besar dan aplikasi Smartkampung untuk menampilkan harga harian secara *real-time* terbukti efektif menjaga ekspektasi harga masyarakat. Masyarakat menjadi konsumen cerdas yang tahu harga acuan, sehingga pedagang tidak dapat menaikkan harga secara sepihak.
- b. **Program Jagoan Banyuwangi sebagai Media Edukasi:** Inovasi ini berhasil mengomunikasikan kebijakan ekonomi daerah kepada generasi muda. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran petani milenial dalam menerapkan teknologi pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan.
- c. **High Level Meeting (HLM) & Weekly Performance:** Konsistensi pelaksanaan rapat mingguan bersama TPID, Bank Indonesia, dan BPS memastikan setiap anomali harga langsung direspon dengan kebijakan teknis. Koordinasi ini merupakan kunci keberhasilan Banyuwangi menjaga inflasi tetap dalam sasaran target nasional.
- d. **Edukasi Publik & Manajemen Ekspektasi:** Penggunaan media massa dan media sosial untuk kampanye "Belanja Bijak" dan edukasi pengendalian inflasi dari rumah tangga (Gerakan Pangan Mandiri) terbukti mampu meredam gejolak permintaan musiman.
- e. Pembinaan penyuluh dan praktik pembuatan pupuk organik merupakan langkah mitigasi yang sangat relevan di tengah kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi nasional. Inisiatif ini berhasil menjaga produktivitas lahan petani meskipun terjadi keterbatasan input kimia. Selain mempertahankan kesuburan tanah jangka panjang, penggunaan pupuk organik secara mandiri terbukti menurunkan biaya produksi di tingkat hulu, sehingga memberikan ruang bagi petani untuk tetap kompetitif tanpa harus menaikkan harga jual komoditas saat panen.
- f. Aktivitas pengawasan rutin oleh Petugas Monitoring Harga serta Petugas Perdagangan Antar Daerah/Pulau memberikan data primer yang akurat mengenai alur barang. Pengawasan ini efektif dalam mendeteksi hambatan distribusi secara dini dan mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan barang kebutuhan pokok. Koordinasi antar daerah dan antar pulau memastikan stok pangan di Banyuwangi tetap terjaga, serta meminimalkan risiko disparitas harga antar wilayah di dalam Kabupaten.
- g. Proses analisis sumber dan potensi tekanan inflasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan merupakan bentuk deteksi dini (*Early Warning System*) yang krusial bagi TPID. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Ketua TPID memastikan bahwa setiap anggota TPID bergerak secara sinkron dan tepat sasaran. Evaluasi menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif pada bulan berjalan berhasil meredam dampak inflasi dari komoditas yang sebelumnya mengalami anomali harga, sehingga inflasi daerah tetap berada dalam koridor yang terkendali.
- h. Penyusunan kebijakan yang menyelaraskan arahan Nasional dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen Banyuwangi dalam menjaga keselarasan indikator makroekonomi. Strategi ini memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat kabupaten tidak kontraproduktif dengan kebijakan pusat. Sinergi ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah pendukung stabilitas pangan regional, sekaligus memastikan bahwa instrumen kebijakan lokal (seperti Operasi Pasar dan GPM)
- f.

sejalan dengan jadwal intervensi provinsi untuk hasil yang lebih masif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Pemkab Banyuwangi akan memperluas frekuensi dan jangkauan Gerakan Pangan Murah hingga ke tingkat desa untuk memastikan akses komoditas pokok murah lebih merata dan mencegah lonjakan harga lokal. Selain itu, koordinasi intensif dengan Bulog dan TNI-Polri perlu diperkuat untuk menyesuaikan stok dan harga operasi pasar secara real-time sesuai fluktuasi permintaan dan kondisi pasokan.
- b. Pemkab Banyuwangi akan menambah jumlah dan durasi operasi pasar di setiap kecamatan untuk memastikan ketersediaan komoditas pokok stabil sepanjang bulan dan menjangkau lebih banyak rumah tangga. Selain itu, koordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, dan pelaku usaha lokal perlu diperkuat untuk menyesuaikan pasokan dan harga secara cepat sesuai fluktuasi permintaan di pasar.
- c. Pemkab Banyuwangi akan memperluas jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kecamatan lain dan meningkatkan kapasitas dapur komunitas untuk menjangkau lebih banyak pelajar dan rumah tangga. Selain itu, pembelian bahan baku sebaiknya terus difokuskan pada produsen lokal untuk menjaga stabilitas harga, mendukung rantai pasok lokal, dan memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas.
- d. Pemkab Banyuwangi akan memperluas cakupan program Bansos digital Parlinsos agar lebih banyak rumah tangga berpenghasilan rendah dapat menerima bantuan tepat sasaran, terutama saat harga kebutuhan pokok meningkat. Selain itu, integrasi data lintas kementerian dan pemantauan real-time perlu diperkuat untuk memastikan ketepatan sasaran, respons cepat terhadap fluktuasi harga, dan efektivitas program dalam menjaga daya beli masyarakat.
- e. Pemkab Banyuwangi akan terus menyelenggarakan program penguatan kapasitas UMKM, termasuk pelatihan ekspor, pemasaran digital, dan standar kualitas produk, agar pelaku usaha lokal semakin kompetitif di pasar global dan harga produk domestik tetap terjangkau. Selain itu, kolaborasi dengan Bank Indonesia dan stakeholder terkait perlu diperkuat untuk mendukung akses pasar, efisiensi produksi, dan stabilitas harga dalam rantai distribusi lokal.
- f. Pemkab Banyuwangi kedepannya akan terus mengintegrasikan city branding dengan promosi produk UMKM melalui festival, pameran, dan atraksi wisata untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha lokal. Selain itu, strategi ini perlu diikuti dengan pendampingan efisiensi produksi agar biaya per unit menurun sehingga harga produk tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
- g. Pemkab Banyuwangi akan terus menggalakkan Gerakan Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM, dan Warung Rakyat setiap “tanggal cantik” untuk memastikan arus distribusi barang tetap lancar dan stok pedagang stabil. Selain itu, integrasi dengan layanan ojol dan pelibatan ASN, BUMN, dan BUMD perlu dipertahankan agar transaksi meningkat, permintaan bergerak, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemkab Banyuwangi akan memperluas program pemanfaatan lahan tidak produktif

menjadi kawasan pertanian produktif dan Eco Space di desa lain untuk meningkatkan pasokan pangan lokal. Selain itu, pelatihan budidaya, peternakan kecil, dan pembuatan pupuk organik bagi masyarakat terutama perempuan perlu diperkuat agar ketahanan pangan rumah tangga meningkat dan tekanan harga bahan pangan dapat ditekan.

- b. Implementasi Masif SAPA PAK MENTAN dengan mendorong optimalisasi lahan melalui indeks pertanaman (IP 300-400) dengan dukungan penuh mekanisasi Alsintan (UPJA). Hal ini krusial untuk menjaga surplus beras tetap konsisten di atas 200.000 ton per semester.
- c. Skalabilitas Pupuk Organik dengan menjadikan praktik pembuatan pupuk organik sebagai gerakan masif di seluruh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian). Hal ini merupakan solusi jangka panjang atas pengurangan subsidi pupuk kimia guna menekan biaya produksi petani dan menjaga harga pangan tetap kompetitif.
- d. Penguatan WARM System untuk Mitigasi El-Nino sehingga meningkatkan akurasi data *real-time* pada WARM System untuk pengaturan debit air yang lebih presisi, terutama pada lahan sawah yang masuk dalam Rencana Tata Tanam Global (RTTG) agar terhindar dari risiko gagal panen.
- e. Pemkab Banyuwangi akan meningkatkan frekuensi dan cakupan operasi pasar di seluruh kecamatan untuk memastikan pasokan komoditas strategis seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan LPG tetap stabil dan harga terjangkau. Selain itu, koordinasi intensif dengan Bulog, Bank Indonesia, dan pelaku usaha lokal perlu diperkuat agar distribusi lebih merata dan responsif terhadap fluktuasi permintaan dan harga di pasar.
- f. Pemkab Banyuwangi akan terus mendorong penguatan kapasitas UMKM melalui pelatihan ekspor, pemasaran digital, dan pengelolaan rantai pasok agar kualitas dan kontinuitas produksi terjaga, sehingga pasokan barang strategis di daerah stabil. Selain itu, kolaborasi dengan Bank Indonesia dan pelaku usaha hulu-hilir perlu diperkuat untuk memastikan suplai bahan baku, menopang ketersediaan komoditas, dan menekan potensi fluktuasi harga.
- g. Pemkab Banyuwangi akan terus mengintegrasikan city branding dengan penguatan UMKM lokal melalui promosi produk unggulan, festival, dan atraksi budaya untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume produksi. Selain itu, strategi ini perlu diikuti dengan pendampingan efisiensi produksi agar pasokan barang lokal tetap stabil dan harga produk terjangkau, sehingga mendukung pengendalian inflasi.
- h. Pemkab Banyuwangi akan terus memastikan kesiapan dan optimalisasi UPJA Alsintan untuk mendukung percepatan tanam MT III serta meningkatkan luas tanam dan produktivitas pertanian. Selain itu, koordinasi dan dialog dengan petani, penyedia sarana produksi, dan pelaku usaha alsintan perlu diperkuat agar kontinuitas pasokan pangan strategis tetap terjaga dan tekanan harga dapat diminimalkan.
- i. Pemkab Banyuwangi akan terus mendorong penanaman jagung serentak di lahan pondok pesantren dan wilayah lain untuk meningkatkan produksi, memperluas basis pasokan, serta menjaga kontinuitas ketersediaan pangan strategis. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan forkopimda, pemerintah desa, dan petugas lapang perlu diperkuat agar rantai pasok jagung lebih stabil dan potensi gejolak harga dapat ditekan.
- j. Pemkab Banyuwangi akan terus mengembangkan program Jagoan Tani untuk mendorong petani muda mengadopsi pertanian modern seperti hidroponik, sehingga pasokan hortikultura tetap stabil dan risiko gejolak harga dapat dikurangi. Selain itu, dukungan akses permodalan, pendampingan keterampilan, dan perluasan jejaring pasar perlu diperkuat agar kapasitas produksi meningkat dan rantai pasok pangan terjaga secara berkelanjutan.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Optimalisasi Jalur Logistik Vital dengan melakukan koordinasi berkala dengan otoritas pelabuhan dan perhubungan untuk memberikan prioritas jalur bagi kendaraan pengangkut bahan pokok penting (Bapokting), guna menghindari pembengkakan biaya logistik akibat kemacetan atau hambatan di jalur utama seperti Gumitir.
- b. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau dan mengoptimalkan koordinasi transportasi darat dan kereta api saat penutupan Jalur Gumitir untuk memastikan distribusi barang dan mobilitas masyarakat tetap lancar. Selain itu, penyesuaian rute bus dan titik pemberhentian kereta api perlu dievaluasi secara berkala agar biaya logistik tetap terkendali dan harga barang di pasaran stabil.
- c. Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) Terintegrasi dengan melanjutkan target pembangunan infrastruktur jalan desa dan jembatan yang menghubungkan langsung sentra produksi dengan pasar induk untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.
- d. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau efektivitas jembatan darurat dan jalur alternatif untuk memastikan distribusi barang dan mobilitas masyarakat tetap lancar. Selain itu, kajian teknis dan perencanaan pembangunan jembatan permanen perlu dipercepat agar kelancaran arus logistik terjaga jangka panjang dan tekanan harga akibat hambatan distribusi dapat diminimalkan.
- e. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau dan mengatur arus kendaraan di akses Pelabuhan Ketapang melalui posko gabungan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi logistik tetap lancar. Selain itu, dukungan sosial bagi sopir dan komunikasi intensif dengan pengelola pelabuhan perlu dipertahankan agar keterlambatan pasokan dapat diminimalkan dan tekanan inflasi tetap terkendali.
- f. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau dan mengevaluasi kelancaran distribusi di Jalur Gumitir pasca pembukaan fungsional untuk memastikan arus barang tetap lancar dan biaya logistik terkendali. Selain itu, koordinasi berkelanjutan dengan BBPJJN dan pihak terkait perlu dipertahankan agar risiko keterlambatan pasokan dan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen dapat diminimalkan.

4. Komunikasi Efektif

- a. Manajemen Ekspektasi via Media Sosial dengan mengintensifkan kampanye "Belanja Bijak" dan "Stop Boros Pangan" melalui konten kreatif yang menyasar generasi muda dan ibu rumah tangga guna mencegah lonjakan permintaan yang tidak wajar (*panic buying*) menjelang hari besar keagamaan.
- b. Sinkronisasi Data Superteam dengan memperkuat kolaborasi data antara Bank Indonesia, BPS, dan SKPD teknis dalam forum *High Level Meeting* (HLM) serta *Weekly Performance* agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Ketua TPID bersifat *data-driven* dan responsif terhadap perubahan harga harian.
- c. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau efektivitas program Jagoan Banyuwangi dalam menyampaikan kebijakan ekonomi dan mendukung pelaku usaha muda agar informasi yang diberikan dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Selain itu, evaluasi rutin terhadap partisipasi dan capaian peserta dapat membantu menilai dampak program terhadap stabilitas ekonomi daerah dan ekspektasi harga di masyarakat.
- d. Pemkab Banyuwangi akan melakukan evaluasi efektivitas HLM dengan memantau sejauh mana arahan kebijakan pengendalian inflasi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selain itu, pengumpulan data tindak lanjut hasil rapat dan capaian koordinasi lintas lembaga dapat dijadikan indikator keberhasilan komunikasi kebijakan dalam menjaga ekspektasi dan stabilitas

harga.